

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengalokasian Dana Desa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam sistem penganggaran. Desa sebagai salah satu unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk menunjang pembangunan yang ada didesa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengemban dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan desa menggunakan dana APBDesa, untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa wajib menjalankan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan (Nugrahaningsih dan Winarna, 2016). Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal yaitu kreditur dan Pemeritah (Pratiwi, dkk., 2014)..

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, saat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan daerah yang efektif dan efisien harus dilakukan secara optimal, karena seringkali realisasi tidak sesuai dengan target.

Menurut Bastian (2015) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas harus diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program, kegiatan atau organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas sangat penting untuk diterapkan karena apabila melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Efektivitas menjadi tolak ukur atas berhasil atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan.

Menurut Abdul dan Muhammad (2019: 163) efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Efisiensi sangat penting karena dapat menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan, selain itu efisiensi juga dapat memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang ada sehingga tidak ada yang terbuang percuma.

Dengan adanya dana desa, maka Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien, efektif dan efisien yang dimaksud yaitu dimana pemerintah desa diharuskan untuk menyelesaikan suatu program secara tepat, hemat, dan tepat waktu dimana juga mengharuskan pemerintah desa bekerja secara maksimal tanpa mengeluarkan banyak biaya dari dana desa tersebut.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui Kementrian Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan Keuangan Desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu pendirian BUMDes ini juga menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2008 perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa pada Bab III pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan operasional (direktur) berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha setiap bulan. Selain itu peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Bab III menyatakan bahwa pelaksana operasional (direktur) berkewajiban membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha BUMDes. Tentu saja hal ini harus berpedoman pada standar keuangan yang berlaku umum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan Laporan keuangannya maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP. Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ini artinya bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Badan usaha Milik Desa ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instansi payung dalam menaungi. Upaya ini penting dalam rangka mengurangi peran *free rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui *praktek rent* (Nurcholis, 2011:88).

Permasalahan yang sering dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah hampir dari separuh lebih Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia mati suri. Minimnya kemampuan pengelolaan serta

lemahnya pembinaan dari aparat desa serta rasa ketidakpedulian masyarakat desa dan pengelolaan dana desa yang tidak efisien mengakibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tanah air yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan tidak sedikit yang gulung tikar (liputan6.com). Di Indonesia jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai 39.149 buah yang tersebar di tanah air, sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berada di pulau Jawa dan Sumatra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebut beberapa diantaranya yang benar-benar hidup namun juga banyak yang mati suri, oleh karena itu Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melihat perlu ada peningkatan kapasitas pengelolaan dan juga aparat desa (m.detik.com)

Strategi pengembangan ekonomi di Desa Gaya Baru VII dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hidup orang banyak dalam sebuah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru pada sebuah pedesaan.

BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) Tunas Muda adalah nama BUMDes yang terletak di desa Gaya Baru VII, Kecamatan Seputih Surabaya. Sumber dana BUMDes BUMK Tunas Muda adalah dari dana desa yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa Gaya Baru VII serta disaksikan oleh masyarakat Desa Gaya Baru VII. Pengelolaan dana desa dikelola sendiri oleh Ketua BUMDes dan para anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk mencapai tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut yaitu mensejahterakan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku ketua BUMK Tunas Muda pada Sabtu 9 Januari 2022 mengenai fenomena yang terjadi di Desa Gaya Baru VII yaitu lembaga dan perangkat desa sudah mengetahui mengenai program BUMDes berdasarkan program pemerintah sebelumnya, namun sosialisasi yang kurang, muncul ketegangan dari masyarakat terutama dari pemerintah desa

untuk membentuk BUMDes yang dianggap rumit, fenomena lain yang terjadi di desa Gaya Baru VII yaitu kurangnya rasa kepedulian masyarakat Desa Gaya Baru VII dalam pertumbuhan BUMK Tunas Muda, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan dari aparat desa mengenai pentingnya BUMDes bagi setiap desa serta sarana untuk menjadikan desa mandiri serta lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan dana desa yang menyebabkan kurangnya percepatan pertumbuhan BUMDes.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Percepatan Pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Gaya Baru VII Kecamatan Seputih Surabaya”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam menunjang percepatan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Melihat ada beberapa jenis Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Kecamatan Seputih Surabaya maka peneliti membatasi masalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dalam menunjang percepatan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Gaya Baru VII saja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa sudah efektif dan efisien sehingga dapat menunjang percepatan pertumbuhan Badan Usaha milik Desa (BUMDes).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah keuangan desa pada Desa Gaya Baru VII sudah efektif dan efisien untuk menunjang percepatan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh Desa Gaya Baru VII, dilihat dari masih beroperasi atau tidaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh Desa Gaya Baru VII.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan akuntansi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

### 3. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi masyarakat dan desa-desa lain tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa untuk menunjang percepatan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## F. Metode Penelitian

### 1. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel nya adalah sebagai berikut:

#### a. Variabel dependen

Variabel devenden atau terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono,2017). Variabel terkait pada penelitian ini adalah percepatan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan peran besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Apabila pengelolaan potensi desa dilakukan secara baik dan dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhasil dalam operasionalnya dan mengalami percepatan pertumbuhan, maka akan sangat menguntungkan desa itu sendiri.

#### b. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab dari perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2017)

Varabel bebas dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efktivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan taerget belanja. Dengan demikian

untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Mengukur Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

SKOR	HASIL PENCAPAIAN
>100%	Sangat Efektif
90 – 99%	Efektif
80 – 89%	Cukup Efektif
60 – 79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber : standar acuan litbang depdagri)

## 2) Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik, begitu juga sebaliknya, oleh karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pengeluaran ditekan dengan serendah mungkin. Sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi menggunakan *output* atau untuk menghasilkan tingkat *input* tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, yaitu:

**Tabel 2. Kriteria Mengukur Efisiensi Pengelolaan Dana Desa**

SKOR	HASIL PENCAPAIAN
>100%	Tidak Efisien
90 – 99%	Kurang Efisien
80 – 89%	Cukup Efisien
60 – 79%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

(Sumber : standar acuan litbang depdagri)

### 3) Pengelolaan Dana Desa

Proses pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien sehingga menunjang percepatan pertumbuhan BUMDes BUMK Tunas Muda Desa Gaya Baru VII adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan penggunaan dana desa
- b. Pelaksanaan penggunaan dana desa
- c. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa

Pengukuran dilaksanakan dengan cara *checklist* pada penerapan pengelolaan dana desa dalam proses penerimaan, perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yang akan diukur dengan menggunakan skala nominal dengan jawaban YA dan TIDAK. Perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban YA/TIDAK kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$Presentase = \frac{\text{jawaban "YA"}}{\text{jumlah kuisisioner}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa**

SKOR	HASIL PENCAPAIAN
0%-25%	Tidak Efektif dan Efisien
26%-50%	Kurang Efektif dan Efisien
51%-75%	Cukup Efektif dan Efisien
76%-100%	Sangat Efektif dan Efisien



(Sumber : standar acuan litbang depdagri)

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Kualitatif**

Analisis ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dalam menunjang percepatan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Gaya Baru VII. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexi J Moloeng adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, adalah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data deskriptif kualitatif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah :

- a. Data primer yaitu data yang pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti. Sanusi (2014:104). Data primer dalam penelitian ini dimana didapatkan dengan memberikan kuisioner kepada responden yaitu desa yang mendapatkan dana BUMDes. Data primer ini dapat diperoleh dari individu yang bersangkutan dalam penelitian ini. Adapun cara peneliti memperoleh data primer adalah sebagai berikut:
  1. Catatan hasil wawancara
  2. Hasil studi lapangan
  3. Data-data pengelolaan BUMDes
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari organisasi atau perorangan, data sekunder bentuknya berupa sumber daftar pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta

diperoleh dari literatur yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel dan website.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode dalam pengumpulan atau yang terdiri dari:

#### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan seksama dan sistematis, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pencatatan data secara cermat dan sistematis pada suatu objek yang diteliti. Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

#### **b. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2018). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang sudah ada hubungan dengan objek penelitian.

#### **c. Teknik Wawancara**

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2018). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : KAJIAN LITERATUR**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk pembahasan masalah, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, berisi tentang sejarah singkat tempat perusahaan, lokasi tempat perusahaan, sistem manajemen perusahaan, struktur organisasi perusahaan.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dianggap perlu.

**DAFTAR LITERATUR**